

STRATEGI PERTAHANAN LAUT DALAM MENGHADAPI ANCAMAN KEAMANAN MARITIM DI WILAYAH LAUT INDONESIA

Oleh:

Ichsanul Mutaqin Ali¹⁾, Lukman Yudho P²⁾, Dohar Sianturi³⁾
^{1,2,3} Program Studi Strategi Pertahanan Laut, Universitas Pertahanan
¹piutrigk18@gmail.com,
²kamalekumdeplek@gmail.com,
³sianturi_dohar@yahoo.co.id

Abstrak

Artikel ini menjelaskan tentang strategi pertahanan laut yang dimiliki oleh Indonesia dalam menghadapi ancaman maritim. Bangsa Indonesia memiliki keunggulan letak yang sangat strategis, namun keunggulan letak geografis dan jalur perdagangan laut strategis tersebut mengundang datangnya beberapa ancaman seperti hadirnya kekuatan militer negara-negara adidaya, munculnya pelaku kejahatan seperti penyelundupan, perdagangan manusia, narkoba dan lain-lain). Untuk itu strategi pertahanan laut yang dapat di terapkan untuk menangkal segala macam bentuk ancaman adalah dengan meningkatkan kemampuan deteksi dini di laut. Salah satunya adalah dengan cara mengoptimalkan dan memanfaatkan peran Pusat Informasi Maritim TNI yang berkolaborasi dengan para stake holder, sehingga seluruh penegak hukum di laut dapat mengetahui secara cepat indikasi akan terjadinya kejahatan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian tulisan ini menunjukkan bahwa banyak hal yang harus dibenahi dalam penerapan strategi pertahanan laut untuk menanggulangi ancaman maritim. Dibutuhkan kerjasama yang lebih intensif dan interaksi yang terintegrasi antar lembaga terkait agar upaya penanggulangan ancaman maritim dapat diminimalisir dengan efektif.

Kata Kunci : Lingkungan Strategis, Deteksi Dini, *Stake Holder*, KeamananMaritim, ancaman.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan sebagai negara terluas di Asia Tenggara. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah maritime yang sangat luas. Garis pantainya sekitar 81.000 km. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan wilayah lautnya meliputi 5,8 juta km² atau sekitar 70% dari luas total wilayah Indonesia. Luas wilayah laut Indonesia terdiri atas 3,1 juta km² luas laut kedaulatan dan 2,7 juta km² wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Dari data tersebut dapat dihitung bahwa luas wilayah laut Indonesia adalah 64,97% dari total wilayah Indonesia . Didalamnya dimensi pertahanan dan keamanan. Penentuan batas-batas yuridiksi nasional selalu menemui rintangan khususnya dialami oleh negara-negara kepulauan yang memiliki kepentingan memperoleh sumber daya alam laut baik hasil laut seperti perikanan maupun hasil dibawah perut bumi seperti minyak dan gas. Kasus Sipadan dan Ligita, Celah Timor, Laut Ambalat, Laut China Selatan dan lainnya adalah contoh nyata persoalan batas-batas laut nasional. Hal tersebut dapat memicu dan meningkatkan ketegangan (disputes) maupun konflik (conflicts) antar negara. Indonesia sebagai negara kepulauan harus terus berusaha meningkatkan yuridiksi maritim mereka untuk menanggulangi berbagai macam peluang (opportunities) dan ancaman (treath) yang melingkup.

Kepemerintahan Presiden Jokowi Widodo telah menetapkan kebijakan kemaritiman nasional

melalui konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD). Konsep ini disampaikan Presiden Jokowi Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-9 East Asia Summit (EAS), 13 November 2014. Melalui konsep PMD maka agenda pembangunan nasional akan difokuskan pada lima pilar utama , yaitu:

- Membangun kembali budaya maritim Indonesia.
- Menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama.
- Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim.
- Menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan.
- Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Pada dasarnya, kelima pilar PMD tersebut meliputi aspek budaya, ekonomi, konektifitas, diplomasi, dan keamanan maritim.

Rumusan Masalah dalam Tulisan ini adalah, bisa dilihat di dalam kaitan antara perkembangan lingkungan strategis yang melingkupi Indonesia dan kebijakan nasional yang ditempuh oleh pemerintah

Indonesia. Tetapi, pengaruh perubahan lingkungan strategis pada aspek keamanan maritim. Dengan demikian penulis mencoba menuangkan dalam dua pertanyaan besar, yaitu:

- a. Bagaimana analisis lingkungan strategis pada aspek keamanan maritim Indonesia?
- b. Bagaimana tingkat pengaruh perubahan lingkungan strategis kepada keamanan maritim Indonesia?

Sedangkan mamfaat tulisan ini adalah :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dan saran kepada Pemimpin TNI/TNI Angkatan Laut dalam menentukan kebijakan dalam merumuskan kebijakan strategi Pertahanan Negara di Laut terhadap perubahan lingkungan strategis sebagai dampak pada keamanan maritime Indonesia.
- b. Memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan teori-teori yang terkait pengembangan Strategi Pertahanan Negara di Laut dalam mendukung tugas pokok pada kegiatan dan pelaksanaan tugas militer.
- c. Memberikan kontribusi akademis dalam perumusan dan penelitian design Model Sistem Informasi Pertahanan Negara di Laut (SISNFOHANLA) sebagai pendukung tugas kegiatan terseruktur.

Terkait Lingkungan Strategis, terdapat penjelasan bahwa lingkungan strategis merupakan berbagai konteks, kondisi, hubungan, tren, isu, ancaman, peluang, interaksi, dan dampak terhadap internal maupun eksternal suatu entitas Negara yang mempengaruhi keberhasilannya dalam menjalin hubungan dengan dunia fisik, entitas Negara-negara lain (state actors), aktor non-negara (non-state actors), kesempatan dan kemungkinan-kemungkinan di masa depan . Aktor non-negara tersebut dapat berupa organisasi-organisasi di sektor privat baik yang berorientasi profit maupun non-profit. Oleh karena itu, lingkungan strategis menjadi ruang dan waktu dimana entitas Negara tumbuh, berkembang, ataupun mengalami kehancuran. Apa yang terjadi ataupun akan terjadi pada lingkungan strategis pada dasarnya bersifat mungkin terjadi, dapat diprediksi, masuk akal, dan tidak/belum diketahui. Akan tetapi, lingkungan strategis menunjukkan dua karakteristik sekaligus yaitu keteracakan (randomness) maupun keteraturuan (order) sehingga tidak sepenuhnya tidak dapat terprediksi, acak atau tidak terkontrol . Situasi tersebut diatas menjadikan lingkungan strategis sebuah fenomena dengan kekompleksitas yang tinggi. Hubungan antar elemen dalam lingkungan strategis begitu kompleks (Complexity). Perencanaan dan pengambilan keputusan menjadi semakin tidak mudah dalam lingkungan strategis karena sifat kebiasaan (Ambiguity). Perubahan dan perkembangan lingkungan strategis mempunyai implikasi pada output kebijakan dan arah orientasi institusi politik. Hal ini akan membawa implikasi, baik positif maupun negatif sekaligus secara bersamaan. Implikasi positif akan membawa manfaat dalam

mendukung cita-cita, tujuan dan kepentingan politik, sedangkan implikasi negatif menyebabkan peningkatan potensi ancaman bagi keberlangsungan politik. Dimensi politik- pemerintah-hukum, ekonomi, sosial-budaya, lingkungan, teknologi, dan persaingan antar entitas perlu dipindai dalam lingkungan strategis .

Sementara itu, Kepentingan nasional (national interest) merupakan sesuatu yang harus dicapai, dipelihara, dan dijaga oleh entitas Negara. Drew dan Snow menjelaskan Kepentingan nasional dibedakan menjadi bertahan hidup (survival), vital (vital), terutama (major), dan sisi luar (peripheral) . Nuechterlein menjelaskan kepentingan survival merupakan kepentingan nasional pada tingkat intensitas pertama yang hadir untuk mempertahankan eksistensi fisik sebuah bangsa dari bahaya akan serangan (attack) ataupun ancaman serangan (threat of attack). Pada tingkat intensitas kedua, kepentingan vital terjadi ketika sebuah bangsa melindungi kepentingan nasionalnya dengan menggunakan berbagai upaya kekuatan dari keadaan-keadaan yang dipertimbangkan serius untuk dihadapi. Ada dua karakteristik dari kepentingan vital, yaitu pertama, ketika sebuah bangsa merasa tidak ingin berkompromi kepada sesuatu hal. Kedua, ketika sebuah bangsa memutuskan akan menempuh jalur perang. Biasanya, kepentingan vital berkaitan dengan kedaulatan sebuah Negara-bangsa kepada Negara-bangsa lainnya. Pada tingkat intensitas ketiga adalah kepentingan major merupakan suatu kepentingan terganggu atau terpengaruh yang tidak memerlukan penggunaan kekuatan kepada bangsa seperti politik negara, ekonomi dan sosial. Pada batas intensitas kepentingan antara vital dan major inilah wilayah yang paling sulit dimana menentukan waktu yang tepat atas penggunaan kekuatan militer saat berbagai kepentingan terkait politik, ekonomi, dan sosial telah terganggu oleh pihak lawan tertentu. Pada tingkat intensitas keempat, yaitu peripheral merupakan beberapa kepentingan nasional yang dipengaruhi oleh suatu dampak situasi tetapi tidak mempengaruhi keseluruhan kepentingan nasional.

Keamanan (security) pada dasarnya merupakan upaya mengelola elemen ancaman (threat elements) dengan suatu tujuan akhir terciptanya lingkungan kehidupan pada negara maupun tataran individu yang terbebas dari segala bentuk ancaman . Worfer secara singkat menyampaikan bahwa keamanan bermakna ketidaannya ancaman. Sementara itu berbagai macam pendekatan dan rumusan keamanan telah dikembangkan oleh para ahli, mulai dari pedekatan realisme, liberalisme, sosial konstruktifisme, keamanan manusia, dan lain sebagainya. Penjelasan lain menyatakan bahwa sekalipun telah dirumuskan berbagai macam pendekatan dalam 'keamanan' tetapi secara garis besar, keamanan adalah sesuatu yang berkaitan dengan kebertahanan diri (survival) terhadap berbagai ancaman. Berdasarkan hal tersebut maka

keamanan memiliki dua komponen utama, yaitu sumber ancaman dan obyek ancaman suatu obyek yang dapat terancam sehingga perlu dilindungi serta dijaga. Hakikat ancaman sendiri dapat ditinjau dari berbagai macam sudut pandang dimana sangat tergantung kepada bagaimana cara pandang suatu entitas memandangnya. ancaman sebagai segala jenis hal baik yang bersifat masih dalam potensi maupun bentuk aktifitas yang mengancam kedaulatan, keutuhan, dan termasuk upaya mengubah hakikat suatu negara berdaulat baik yang datang dari luar maupun dalam wilayah negara. Selain ancaman, maka suatu entitas perlu memperhatikan pula peluang (opportunity) yang muncul dari lingkungan.

Terminologi keamanan maritim memberikan berbagai makna yang sangat beragam terhadap orang maupun organisasi tergantung bagaimana kepentingan organisasi dan menyarankan 3 kerangka penting untuk merumuskan konsep keamanan maritim yaitu: keamanan maritim matriks (maritime security matrix), kerangka sekuritisasi maritim (securitization framework), kelompok pengguna praktek keamanan (Security Practice and Communities of Practice). Melalui kerangka keamanan maritim matriks, suatu entitas dapat dipetakan bagaimana akan merumuskan keamanan maritimnya pada empat dimensi, yaitu keamanan nasional (national security), keamanan ekonomi (economy security), keamanan manusia (human security), dan lingkungan maritime (marine environment). Dimensi keamanan nasional bertumpu pada perspektif tradisional yang memandang keamanan nasional (national security) sebagai upaya melindungi keberlangsungan negara sehingga kekuatan laut (sea power) yang diwakili oleh Angkatan Laut (naval forces) sebagai kekuatan yang dominan terkait maritim. Dengan demikian, dalam dimensi ini keamanan maritim identik atau berkaitan dengan penggunaan kekuatan angkatan laut.

Lingkungan strategis sebagai lingkungan yang berkategori makro dapat dianalisis menggunakan perangkat PESTEL (Politics, Economy, Social-Culture, Technology,

Environmental, Legal). Analisis tersebut hanya mengukur elemen-elemen yang relevan mempengaruhi kehidupan atau jalannya suatu organisasi atau entitas tertentu pada periode yang telah ditentukan. Kemudian penilaian tingkat pengaruh elemen-elemen tersebut akan dilakukan relatif terhadap organisasi atau entitas tertentu tersebut. Melalui analisis Dengan demikian lingkungan strategis yang melingkupi keamanan maritim akan dinilai melalui faktor-faktor politik, ekonomi, sosial-budaya, teknologi, lingkungan, dan hukum jika tiap faktor tersebut memiliki relevansi yang kuat terhadap keamanan maritim. Di tiap faktor-faktor tersebut akan dipilih beberapa variabel fenomena yang akan menjadi dasar untuk menilai

tingkat pengaruh tiap faktor tersebut kepada keamanan maritim.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Studi kepustakaan adalah melakukan pendalaman data-data berdasarkan kajian teoritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut dokumen Buku Putih Pertahanan Indonesia, kepentingan nasional adalah menjaga tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta terjaminnya kelancaran pembangunan nasional guna mewujudkan tujuan nasional. Sedangkan Tujuan Nasional yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Di dalam dokumen buku putih sebelumnya tersebut disebutkan kepentingan nasional Indonesia disusun dalam tiga kategori, yaitu bersifat mutlak, vital, dan penting. Tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kepentingan nasional yang bersifat mutlak sehingga segala daya upaya perlu dilakukan untuk kepentingan tersebut. Sementara itu memastikan tetap berlanjutnya pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, sejahtera, adil, makmur, dan demokratis merupakan kepentingan nasional yang bersifat vital. Sedangkan kepentingan nasional memiliki kategori bersifat penting ketika Indonesia berkepentingan untuk turut menciptakan perdamaian dunia dan stabilitas regional. Ada tiga kaidah pokok untuk mewujudkan kepentingan nasional, yaitu tata kehidupan, upayan pencapaian tujuan, dan sarana yang digunakan. Pencermatan kesatuan tata nilai dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang berketuhanan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi kebhinekaan dalam interaksi sosial yang harmonis adalah kaidah pokok dalam perwujudan kepentingan nasional.

Kaidah upaya pencapaian tujuan menitik beratkan perhatian kepada perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang memiliki sifat keberlanjutan, berwawasan lingkungan, dan berketahanan nasional yang berdasarkan wawasan nusantara. Penggunaan seluruh potensi dan kekuatan nasional dilakukan dengan menyeluruh dan terpadu adalah titik tolak dari kaidah pokok sarana yang digunakan. Dalam konteks maritim, kepentingan nasional tersebut akan mengarahkan bagaimana keamanan maritim akan diterjemahkan. Berdasarkan persepektif kepentingan nasional tersebut dihadapkan dengan keamanan maritime maka keamanan maritim Indonesia tampak lebih bercorak kepada keamanan nasional (national security), keamanan manusia (human security), dan keamanan ekonomi (economy security). Sementara lingkungan maritime (marine environment) relatif masih kurang ditekankan, yaitu hanya pada turunan dari pernyataan kepentingan nasional itu sendiri yaitu dijelaskan dalam kaidah-kaidah pokok.

Lebih lanjut Kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD) yang dicanangkan oleh Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang mencakup lima pilar:

- a. Membangun kembali budaya maritim Indonesia (pilar budaya).
- b. Menjaga sumber daya laut dan menciptakan kedaulatan pangan laut dengan menempatkan nelayan pada pilar utama. (pilar ekonomi).
- c. Memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, dan pariwisata maritim. (pilar konektivitas).
- d. Menerapkan diplomasi maritim, melalui usulan peningkatan kerja sama di bidang maritim dan upaya menangani sumber konflik, seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut dengan penekanan bahwa laut harus menyatukan berbagai bangsa dan negara dan bukan memisahkan. (pilar diplomasi).
- e. Membangun kekuatan maritim sebagai bentuk tanggung jawab menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. (pilar keamanan maritim).

Menilik kebijakan PMD dalam kerangka konsep keamanan maritim tersebut pada dasarnya adalah “konsep keamanan maritim” itu sendiri. Oleh karena itu ketika pilar keamanan maritim merupakan salah satu pilar dalam kebijakan PMD menjadi bias dan rancu. Pilar budaya dan ekonomi dalam matriks keamanan maritim dapat masuk kedalam aspek keamanan manusia dan keamanan ekonomi. Pilar konektivitas condong sangat kuat kedalam aspek keamanan ekonomi dan lingkungan maritim. Pilar diplomasi dan keamanan maritim menjelaskan aspek keamanan nasional. Dalam sudut pandang kerangka sekuritisasi juga menjelaskan bagaimana cara pandang pemerintah sebagai otoritas tertinggi yang mewakili NKRI mengenai apa yang seharusnya di

jaga dari berbagai bentuk ancaman dalam konteks kemaritiman. Atau dengan kata lain, secara tidak langsung pemerintah memandang bahwa segala sesuatu yang mengganggu atau menyerang kelima pilar tersebut adalah suatu bentuk ancaman atas keamanan maritim Indonesia. Itulah suatu bentuk serangkaian konstruksi ancaman dalam bentuk pernyataan generik oleh pemerintah Indonesia saat ini yang mewakili NKRI. Akan tetapi sebagaimana Buzan, sampaikan bahwa konstruksi ancaman tersebut akan berhasil jika disampaikan oleh aktor yang memiliki otoritas dan relevan dengan target audiens yang menerima konstruksi tersebut. Syarat aktor yang memiliki otoritas telah terpenuhi, yaitu Pemerintah Republik Indonesia khususnya Kepemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Sedangkan target audiens yang menerima konstruksi tersebut sebagai ancaman merupakan area yang masih abu-abu (grey areas) disebabkan sudah sekian lama bangsa Indonesia tidak cukup memahawi realitas maritim dalam cara pandangnya. Dengan demikian dari sudut pandang kerangka ini terlihat kecenderungan bahwa konstruksi ancaman keamanan maritim masih verada pada sisi aktor yang memiliki otoritas saja, yaitu pemerintah Indonesia yang menampuk kekuasaan saat ini. sekian lama bangsa Indonesia tidak cukup memahami realitas maritim dalam cara pandangnya. Dengan demikian dari sudut pandang kerangka ini terlihat kecenderungan bahwa konstruksi ancaman keamanan maritim masih verada pada sisi aktor yang memiliki otoritas saja, yaitu pemerintah Indonesia yang menampuk kekuasaan saat ini. menunjukkan aspek nasional keamanan yang sangat kental. Laporan Sekretaris Jenderal PBB tahun 2008 dalam *Oceans and the Law of the Sea* menjelaskan tujuh macam konstruksi ancaman maritim yaitu pembajakan dan perampokan bersenjata, aksi teroris, lalu-lintas ilegal persejataan pemusnah massal, lalu-lintas narkotika, penyelundupan dan penjualan manusia melalui laut, ilegal fishing, dan kerusakan lingkungan laut dengan disengaja dan melawan hukum. Jika dibandingkan dengan rumusan ancaman maritim pembentuk keamanan maritim yg disampaikan oleh PBB tampak lebih spesifik dibandingn kebijakan PMD sehingga ketujuh kontruksi ancaman tersebut telah semuanya masuk kedalam kebijakan PMD.

Sebagaimana telah dibahas pada sub bab 3.2, maka penyebutan keamanan maritim Indonesia pada penulisan ini ada pada aspek keamanan nasional yang akan menjadi domain kekuatan TNI AL. Berdasarkan Buku Putih Pertahanan Indonesia disebutkan faktor utama yang menjadi dasar dalam penyusunan desain sistem pertahanan negara baik yang bersifat aktual maupun potensial adalah faktor ancaman yang bersifat militer, non- militer, dan hibrida. Ketiga sifat ancaman tersebut dapat berbentuk ancaman nyata dan belum nyata. Selanjutnya Buku Putih Pertahanan Indonesia menjelaskan ancaman nyata adalah bentuk ancaman yang memiliki tingkat keterjadiannya tinggi

yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena kerap kali terjadi maka ancaman nyata mendapatkan prioritas penanganan, meliputi radikalisme-terorisme, separatisme- pemberontakan bersenjata, perompakan- pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan cyber-spionase, dan peredaran- penyalahgunaan narkoba Sedangkan ancaman belum nyata lebih berorientasi kepada bentuk konflik terbuka ataupun perang konvensional, berhadapannya dua. kekuatan angkatan bersenjata dari negara yang berbeda. Jika menggunakan pendekatan Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Wingarta menyebutkan maka lingkungan strategis dipetakan dalam gatra alamiah (natural determinants) yaitu geografi, demografi, sumber kekayaan alam dan gatra sosial (social determinants) yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan. Keseluruhan gatra tersebut disebut juga dengan delapan gatra atau astragatra. Gatra alamiah disebut juga dengan trigatra yang memiliki sifat statis. Sedangkan gatra sosial disebut juga dengan pancagatra yang memiliki sifat dinamis. Ancaman nyata dan belum nyata akan berdampak kepada aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan. lingkungan strategis yang memunculkan situasi ancaman dan peluang dapat dilihat melalui faktor-faktor politik, ekonomi, Dengan demikian, lingkungan strategis yang melingkupi keamanan maritim Indonesia dalam aspek keamanan nasional yang diwakili oleh kekuatan TNI-AL sehingga akan memunculkan peluang dan ancaman dari tinjauan faktor politik-hukum, ekonomi, pertahanan-keamanan, sosial-budaya, teknologi, dan lingkungan.

Pembahasan mengenai wilayah dan kedaulatan maritim sebuah Negara telah menjadi diskusi penting di mata dunia sejak dulu. Untuk mengatur Zona Ekonomi Eksklusif, PBB mengadakan konferensi hukum laut pertama pada tahun 1958 dan konferensi hukum laut yang kedua pada tahun 1960 yaitu yang lebih dikenal dengan istilah UNCLOS I dan UNCLOS II. Dalam konferensi hukum laut pertama ini melahirkan 4 buah konvensi, dan isi dari konvensi UNCLOS pertama ini adalah: (1) Konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan (convention on the territorial sea and contiguous zone) belum ada kesepakatan dan diusulkan dilanjutkan di UNCLOS II; (2) Konvensi tentang laut lepas (convention on the high seas): a. Kebebasan pelayaran, b. Kebebasan menangkap ikan, c. Kebebasan meletakkan kabel di bawah laut dan pipa-pipa, d. Kebebasan terbang di atas laut lepas; (3) Konvensi tentang perikanan dan perlindungan sumber-sumber hayati di laut lepas (convention on fishing and conservation of the living resources of the high sea);

dan (4) Konvensi tentang landas kontinen (convention on continental shelf).

Bagi Indonesia sendiri domain maritim sangatlah penting. Seperti yang diutarakan oleh Laksamana TNI Agus Suhartono, Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia memiliki elemen-elemen dari kepentingan nasional yang terkait dengan domain maritim. Makna laut bagi bangsa Indonesia yaitu laut sebagai medium transportasi, medium kesejahteraan, dan medium pertahanan . Jika pemerintah tidak serius dalam menjaga kedaulatan lautnya, maka yang terjadi adalah seperti beberapa kasus seperti Pulau Sipadan dan Ligitan, maupun pulau Ambalat yang saat ini sudah berada dikedaulatan pemerintah Malaysia . Pada kasus Sipadan dan ligitan, pemerintah Indonesia awalnya tidak memasukan kedua pulau tersebut kedalam peta wilayah lautnya, berbeda dengan Malaysia, ketika pulau tersebut masih dalam status quo, mereka sudah membangun resort meskipun kedua pulau tersebut memang tertera berada dalam peta wilayah laut Indonesia. Mereka beranggapan bahwa meskipun kedua pulau tersebut masih sengketa, namun berada pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif sehingga dianggap berhak atas kekayaan dan sumber daya atas pulau tersebut. Contoh lainnya yaitu tentang kasus Ambalat yang bernasib hampir serupa dengan Pulau Sipadan dan Ligitan. Dalam kasus Ambalat, disebutkan bahwa faktanya Ambalat bukan pulau melainkan suatu wilayah perairan yang terletak antara Indonesia dan Malaysia dan berada sekitar 80 mil dari garis pantai Indonesia . Hal tersebut tentu sesuai dengan hasil dari UNCLOS tentang Zona Ekonomi Eksklusif sehingga Ambalat berada dalam zona tersebut yaitu sejauh 200 mil dari garis pantai. Meskipun Ambalat berada pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, namun tentunya hal tersebut juga berlaku bagi Malaysia karena sama-sama Negara yang meratifikasi UNCLOS, bahwa garis pantai Malaysia pun masih berada pada rentang Zona Ekonomi Eksklusif sejauh 200 mil dari garis pantai. Sehingga terjadinya tumpang tindih penguasaan atas Zona Ekonomi Eksklusif. Berdasarkan ketentuan UNCLOS tentang Zona Ekonomi. Eksklusif bahwa Indonesia dan Malaysia sama- sama memiliki hak untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang berada dalam rentang jarak 200 mil dari garis pantai masing- masing negara.

Perundangan yang terkait dengan kelautan mencakup 16 kebijakan setingkat undang-undang yang merentang mulai dari ZEE, konservasi sumber daya hayati sampai dengan pertahanan dan keamanan. Demikian kompleks dan ragam kebijakan terkait kemaritiman yang terfragmentasi dan saling tumpang tindih berpotensi membuat langkah pengambilan keputusan dalam keamanan maritim Indonesia menjadi lambat dan rumit. Salah satu bentuk contoh tumpang-tindih kebijakan adalah permasalahan perbatasan maritim antara provinsi dan kota. Undang- undang No. 22/1999, yang kemudian

digantikan Undang-undang No. 32/2004, mensahkan setiap provinsi memiliki zona maritim sejauh 12 mil yang diukur dari titik pantai, dan setiap wilayah kota otonomi yang memiliki wilayah maritim memiliki zona maritim sejauh 4 mil dari titik pantai. Kebijakan tersebut kemudian berakibat pada tumpang tindih penguasaan wilayah maritim antara provinsi yang bertetangga, dan dengan pemerintah pusat. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki garis pantai yang panjang. Konsekuensi pemberlakuan hukum tersebut adalah masalah kepemilikan dan otoritas terhadap pulau terpencil. Permasalahan juga muncul pada izin berlayar ataupun izin pengelolaan sumber daya perikanan. Walaupun UU No. 34 telah menyebutkan peran utama TNI-AL dalam kemaritiman, penanganan keamanan maritim Indonesia melibatkan tujuh lembaga yang berbeda yaitu TNI, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Bea Cukai, Imigrasi, kementerian perhubungan, kementerian lingkungan hidup, dan badan koordinasi keamanan laut (Bakorkamla). Disaat yang bersamaan kedaulatan wilayah laut yang merupakan bagian penting dalam keamanan maritim dengan aspek keamanan nasional melibatkan lima lembaga, yaitu TNI, kementerian dalam negeri, kementerian luar negeri, kementerian pertahanan, dan kementerian hukum dan HAM.

Sampai tahun 2020, di prediksi kawasan ASEAN akan menunjukkan pertumbuhan pendapatan domestik bruto (gross domestic products-GDP) yang menggembirakan dengan tumbuh sekitar 50% senilai lebih US\$ 5,000 bn. Kondisiyang patut diperhatikan adalah Amerika Serikat (United State of America-US) yang merupakan Negara dengan perekonomian terkuat pada tahun 2007, senilai GDP hampir S\$ 15,000 bn tetapi kemudian akan disalip oleh China pada tahun 2020 dengan GDP sebesar US\$ 25,000 bn. Pautan antara perekonomian US (US\$22,500 bn) dan China (US\$ 25,000 bn) padatahun 2020 tersebut tidaklah terlalu lebar sehingga kekuatan ekonomi dunia akan mengalami bipolarisasi. Negara-negara dikawasan Asia seperti India, Jepang, dan Korea Selatan menunjukkan peningkatan cukup tinggi pula pada tahun 2020. Situasi khusus terjadi untuk India yang akan diprediksi mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan tumbuh hampir60% atau senilai 10,000 bn pada tahun 2020 dibanding sebelumnya tahun 2007 sebesar US\$ 4,000 bn. Keadaan tersebut akan berpeluang besar meningkatnya kontestasi pengaruh dari Negara-negara besar (great powers) khususnya US dan China ditambah dengan munculnya Amerika-US) yang merupakan Negara dengan perekonomian terkuat pada tahun 2007, senilai GDP hampir US\$ 15,000 bn tetapi kemudian akan disalip oleh China pada tahun 2020 dengan GDP sebesar US\$ 25,000 bn. Pautan antara perekonomian US (US\$22,500 bn) dan China (US\$ 25,000 bn) padatahun 2020 tersebut tidaklah terlalu lebar sehingga kekuatan ekonomi dunia akan

mengalami bipolarisasi. Negara-negara dikawasan Asia seperti India, Perekonomian regional ASEAN diwarnai dengan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahap demi tahap mulai dari tahun 2016. MEA akan dibangun melalui empat pilar, yaitu pasar dan basis produksi bersama, kawasan kompetitif ekonomi, kesetaraan pembangunan ekonomi, dan integrasi kedalam ekonmi global. Khususnya pilar pertama, pasar dan basis produksi bersama, terdiri dari lima . Kondisi ini akan mendorong peningkatan lalu lintas barang, jasa, dan manusia di kawasan maritim nasional maupun kawasan Asia Tenggara. Potensi tingginya lalu lintas dikawasan maritim tersebut akan memunculkan kondisi keamanan baru mulai dari ancamanperompakan, keselamatan pelayaran, human trafficking, dan lainnya. Integrasi perdagangan dalam MEA akan menciptakan ketergantungan dan kerjasama yang saling menguntungkan antar negara-negara anggota. Secara bersamaan, ketergantungan dapat meminimalkan potensi-potensi konflik antar negara. World Bank memprediksi perekonomian Indonesia akan bertumbuh kembali setelah masa penurunannya sehingga di tahun 2018 akan kembali mencapai pertumbuhan ekonomi ebesar 6%. Kemampuan ekonomi Indonesia merupakan modal yang sangat diperlukan sebagai sumber daya dana untuk menjaga keutuhan negara kepulauan, perlindungan, dan pemanfaatan sumber daya maritim. Dilihat dari sudut Keterkaitan antara kemampuan ekonomi yang ditunjukkan melalui belanja pemerintah dengan fungsi anggaran pertahanan. Peningkatan belanja fungsi pertahanan hampir 3x lipat dengan capaian Rp. 81,8 triliun, 11% kontribusi terhadap total belanja pemerintah dalam kurun waktu 2007-2013 . Diantara kurun waktu tersebut, yatu tahun 2008 terjadi penurunan yang cukup tajam akibat krisis ekonomi dunia, subprime mortgage, yang menekan perekonomian Indonesia. Namun demikian, jika dilihat lebih jauh kekuatan terbesar kita ada pada jumlah tentara angkatan laut dan total kapal yang dimiliki tetapi memiliki kapal patroli yang cukup sedikit sekitar 31. Dibandingkan dengan negara-negara seperti Thailand dan Malaysia

yang lebih kecil bentang pesisir dan lautnya, Indonesia memiliki armada kapal patroli yg sangat sedikit. Begitu pula dengan kepemilikan kapal jenis frigate dan kapal selam, Indonesia masih terlampau kecil ditinjau dari kondisi negara kepulauan. Kawasan maritim Asia merupakan wilayah yang sangat rawan akan pembajakan dan perampokan, khususnya Kawasan Asia Tenggara. Menurut laporan dari International Maritime Bureau/IMB total insiden pembajakan dan perampokan kapal sebesar 141 kali terjadi di kawasan Asia Tenggara sepanjang tahun2014. Bahkan keadaan ini lebih tinggi dari kawasan Afrika yang terjadi sebesar 55 kali. Didalam kawasan Asia Tenggara, wilayah maritim Indonesia terjadi insiden pembajakan dan perampokan yang paling banyak. Walaupun telah terjadi penurunan

insiden pembajakan yang signifikan dari 91 insiden pada tahun 2001 menjadi 40 insiden pada tahun 2010 tetapi tetap tertinggi diantara negara-negara tetangga. Wilayah Laut China Selatan secara mengejutkan melonjak secara drastis dengan 31 insiden di tahun 2010 dibanding tahun sebelumnya hanya 13 insiden. Selain itu, IMB melaporkan bahwa dari 245 laporan penyerangan di tahun 2014, sekitar 183 laporan tersebut atau 75% terjadi di enam lokasi yaitu Indonesia, Malaysia, Nigeria, Selat Singapura, Bangladesh, dan India. amun, lebih dari 50% penyerangan alam enam lokasi tersebut terjadi di Indonesia, 100 laporan penyerangan. Contoh lokasi yang paling rawan di wilayah maritim Indonesia adalah selat malaka, yang merupakan jalur strategis perdagangan internasional dengan lebih dari 70.000 kapal melintasinya per tahun. Bahkan lebih jauh Llyod's Association menyatakan bahwa Selat Malaka, bersama dengan negara-negara seperti Irak dan Somalia merupakan daerah yang memiliki bahaya perang dan terorisme. Persoalan lainnya di kemaritiman regional dan nasional adalah apa yang disebut oleh Buku Pertahanan Indonesia (2015) sebagai kejahatan lintas negara (transnational crime) seperti perdagangan gelap narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, dan terorisme. Khusus mengenai perdagangan gelap narkoba ditengarai sebagai salah satu sumber pendanaan bagi kelompok terorisme dan separatisme.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Keamanan maritim Indonesia tidak lepas dari kepentingan nasional yang dituju dan menjadi acuan pemerintah Indonesia, yaitu tetap tegaknya NKRI; memastikan tetap berlanjutnya pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, sejahtera, adil, makmur, dan demokratis; dan turut menciptakan perdamaian dunia dan stabilitas regional. Dalam penulisan ini, lingkungan strategis itu dipetakan ke dalam aktor politik-hukum ekonomi, pertahanan-keamanan, sosial budaya, lingkungan dan teknologi. Peluang dan ancaman terhadap keamanan maritim Indonesia dihasilkan dari lingkungan strategis yang melingkupinya.

Pada faktor hukum, peluang muncul dari adanya konsolidasi dan budaya politik nasional yang sepiantas lalu seperti mengganggu berjalannya roda pemerintahan. Akan tetapi, konsolidasi ini memunculkan banyak potensi harapan dan dapat memberika ruang perbaikan untuk mencapai tujuan dan memperjuangkan kepentingan nasional. otonomi daerah, fragmentasi kebijakan dan kompleksitas kelembagaan maritim nasional merupakan ancaman keamanan maritim nasional. Tingkat pengaruh terbesar (skala enam) kepada keamanan maritim nasional ada pada pembagian zona teritorial laut, kebijakan Re-Balancing Asia pemerintah US dan fragmentasi kebijakan maritim nasional sehingga memerlukan perhatian dan

penanganan seksama. Ancaman dipertimbangkan datang dari besaran dan pertumbuhan ekonomi China yang ekskalatif dan anggaran fungsi belanja pertahanan yang masih rendah belum mencapai target yang direncanakan. Tingkat pengaruh terbesar (skala enam) pada keamanan maritim nasional datang dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, sumber daya alam laut, dan anggaran belanja fungsi pertahanan.

Pada faktor pertahanan-keamanan, hampir keseluruhan variabel kajian menunjukkan kategori ancaman, yaitu konflik perairan di Asia, peningkatan kontestasi kekuatan militer di kawasan Asia, pengeluaran anggaran belanja pertahanan nasional, tingkat insiden pembajakan dan perampokan di perairan Indonesia, kejahatan lintas negara lainnya, dan IUU fishing. Sementara itu kekuatan laut Indonesia merupakan peluang yang dapat dioptimalkan untuk membangun keamanan maritim Indonesia. Kekuatan angkatan laut Indonesia walaupun masih laut Indonesia merupakan peluang yang dapat dioptimalkan untuk membangun keamanan maritim Indonesia. Kekuatan angkatan laut Indonesia walaupun masih Pada faktor sosial budaya, jumlah populasi Indonesia, struktur populasi pada kelompok umur, dan tumbuhnya kesadaran budaya maritim merupakan peluang memperkuat keamanan maritim Indonesia. Namun, pemerataan populasi di wilayah nasional dan budaya masyarakat perbatasan memberikan situasi ancaman kepada keamanan maritim Indonesia. Tingkat pengaruh terbesar (skala enam) datang dari tumbuhnya kesadaran budaya maritim.

Pada faktor lingkungan, peluang terjadi dari kondisi geografis terhadap jalur pelayaran, dan fishing ground. Sedangkan Kondisi geografis terhadap perbatasan negara dan zona bencana merupakan ancaman yang patut dipertimbangkan. Tingkat pengaruh terbesar (skala enam) kepada keamanan maritim Indonesia datang dari hampir seluruh variabel terkecuali zona bencana. Pada faktor teknologi, perkembangan teknologi informasi dan kepemilikan teknologi informasi maritim merupakan peluang untuk meningkatkan kemampuan keamanan maritim Indonesia. Ancaman hadir pada serangan cyber yang ditujukan kepada kepemilikan teknologi informasi maritim.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Bandoro, Bantarto. 2013. Bahan Kuliah Cohort 5- Ancaman, Resiko dan Bencana Keamanan/19 September 2013. Unhan. Jakarta.
- Buzan. 2007. What is national security in the age of globalisation?. London School of Economics and Political Science. London
- Departemen Pertahanan Republik Indonesia. 2015. Buku Putih Pertahanan Indonesia. Departemen Pertahanan RI.
- Kusumaatmadja, Mochtar, 1978. Hukum Laut Internasional, Bandung: Binacipta.

- Lai, David. 2013. *Asia-Pacific : A Strategic Assesment*. U.S Army War College Press. Carlisle Barracks.
- Liss, Caroline. 2007. *The Privatisation of Maritime Security-Maritime Security in Southeast Asia: Between a rock and a hard place?.* Murdoch University : Publisher.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD, Cet.19*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Teo, Yun. 2007. *Target Malacca Straits: Maritime Terrorism in Southeast. Asia. Studies in Conflict & Terrorism*.
- Wingarta, Putu. 2015. *Pengembangan Ketahanan Nasional berbasis Kebhinekaan (Pendekatan Kewaspadaan Nasional)*. Bakohumas Lemhanas RI. Jakarta.
- Suhartono, Agus. 2010. "Membangun Budaya Maritim Dan Kearifan Lokal Di Indonesia: Perspektif TNI Angkatan Laut". *International Conference on Indonesian Studies*.
- Yarger, Harry. 2006. "Strategic Theory for The 21st Century : The Little Book on Big Strategy". Strategic Studies Institute : Carlisle.
- Humas, "Pidato Presiden Jokowi pada KTT ke 9 Asia Timur" (<https://setkab.go.id/pidato-presiden-ri-joko-widodo-pada-ktt-ke-9-asia-timur-di-nay-pyi-taw-myanmar-13-november-2014/>) diakses pada 1 November 2020.